

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu : (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana:2000).

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan yang pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Banyaknya negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis

kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya.

Kemiskinan di Indonesia meliputi kemiskinan yang bersifat relatif (*relative poverty*) dan yang bersifat absolut (*absolute poverty*). Menurut Todaro kemiskinan absolut diindikasikan dengan suatu tingkat kemiskinan yang di bawah kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang (tidak merata).

Kedua bentuk kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif perlu penanganan yang spesifik dalam proses pengentasannya. Pengentasan Kemiskinan Absolut ditempuh dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat rehabilitasi sosial (*social rehabilitation, emergency, cash programme*) dan pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*). Sedangkan pengentasan kemiskinan relatif ditempuh dengan usaha-usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat (*income distribution*).

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia masih berfokus pada pengentasan kemiskinan absolut, misalnya Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Dalam prakteknya pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan yang terakhir di atas banyak menghadapi kendala, baik kendala pendanaan, teknis maupun non-teknis.

Menurut Fahmi Radhi (Direktur Eksekutif Mubyarto Institute dan Wakil Ketua ISEI DIY) dalam tulisannya di rubrik opini di SKH Kedaulatan Rakyat Edisi Jumat (28/12/2012), di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami peningkatan signifikan dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik. Di penghujung tahun 2012, pertumbuhan ekonomi berada di atas 6,3%, tingkat inflasi terkendali rata-rata di bawah 5%, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp 9.500 per dollar AS.

Berdasarkan hasil capaian tersebut, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 6,8%. Sayangnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu ternyata tidak dibarengi dengan pencapaian pemerataan pendapatan hingga menghasilkan ketimpangan dan kerentanan. Padahal, tujuan pembangunan sesuai amanah konstitusi adalah menciptakan kemakmuran bersama melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Indikator ketidakmerataan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan rasio gini dari 0,38 pada 2011 naik menjadi 0,41 pada 2012. Kalau tidak ada komitmen dan upaya serius dari pemerintah untuk menciptakan pemerataan, tidak diragukan lagi pada 2013 rasio gini akan melesat hingga melampaui 0,5, batas ambang ketidakmerataan akut yang kemudian ketidakmerataan tersebut menjadi salah satu penyulut konflik sosial yang merebak di seantero negeri ini sepanjang 2012.

Selain ketidakmerataan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak serta-merta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pada Agustus 2012, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,14% dari total angkatan kerja atau sekitar

7,2 juta orang masih menganggur. Dari total 118 juta angkatan kerja, kurang dari 40% bekerja di sektor formal dan hampir 60% di sektor informal. Dengan tambahan tenaga kerja baru sekitar 2,5 juta orang diperkirakan pada 2013 tingkat pengangguran masih tetap tinggi. Ketidakberdayaan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kecukupan lapangan pekerjaan akan berimbas pada proses kemiskinan. Memang jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi, persentase penurunan kemiskinan tidak signifikan. Sedangkan jumlah penduduk rentan miskin, penghasilannya sedikit di atas penghasilan garis kemiskinan ditetapkan, cenderung semakin meningkat pada setiap tahunnya.

Data BPS menyebutkan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 890 ribu orang, dari sebesar 30,2 juta orang pada 2011 turun menjadi 29,13 pada 2012. Sementara jumlah penduduk yang dikategorikan rentan miskin, justru mengalami peningkatan hingga mencapai 26,39 orang selama 2012. Berdasarkan trend tahun-tahun sebelumnya, jumlah penduduk rentan miskin diprediksikan akan tetap meningkat pada 2013. Tidak berlebihan dikatakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicapai Indonesia sepanjang 2012 justru menghasilkan ketimpangan dan kerentanan, yang mengarah proses pemiskinan. Dengan demikian, tujuan pembangunan untuk mencapai kemakmuran bersama melalui pertumbuhan dan pemerataan di Indonesia masih jauh.

Salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang mempunyai masalah ketimpangan pendapatan adalah provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah

daratannya 68.033 km². Akhir tahun 2010, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 11 wilayah kabupaten dan satu kota administratif, yaitu: Banggai Kepulauan, Banggai, Morowali, Poso, Donggala, Toli-toli, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una Una , Sigi , serta Kota Palu. Jumlah penduduk Sulawesi tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Sulawesi Tengah, Tahun 2007 – 2011



Sumber: Bappeda.Sulteng.go.id.

Pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, juga memikul tanggung jawab yang besar. Tantangan yang dewasa ini sedang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang di dalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah/daerah.

Berikut ini merupakan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah dari tahun 2007 – 2011.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2007 – 2011, (Jutaan Rupiah)

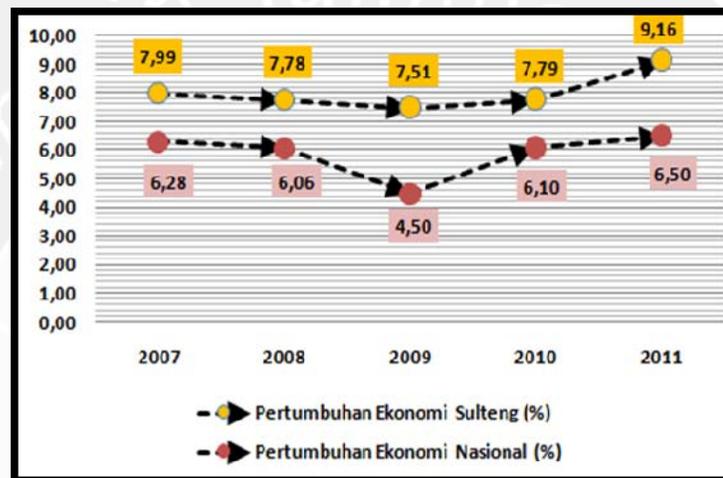
No.	Kab./Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Banggai Kep.	579.712	625.142	675.034	730.984	792.952
2.	Banggai	1.542.888	1.663.439	1.816.718	2.030.960	2.301.914
3.	Morowali	1.388.603	1.542.282	1.657.195	1.863.233	2.100.519
4.	Poso	886.243	954.662	1.028.969	1.109.852	1.201.228
5.	Donggala	1.358.006	1.464.884	1.581.870	1.694.424	1.837.951
6.	Toli-toli	1.044.079	1.118.696	1.204.221	1.299.937	1.398.444
7.	Buol	512.420	549.828	590.057	635.494	685.818
8.	Parigi Mountog	2.417.314	2.598.871	2.796.098	3.014.171	3.251.497
9.	Tojo Una-una	396.000	427.329	461.312	497.459	539.674
10.	Sigi	1.282.477	1.381.749	1.485.554	1.600.448	1.725.837
11.	Palu	2.207.065	2.366.702	2.546.303	2.755.931	3.016.139
Jumlah		13.614.808	14.693.583	15.843.331	17.232.894	18.851.972

Sumber : Sulteng.bps.go.id.

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa perkembangan perekonomian Sulawesi Tengah dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 semakin membaik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya nilai *Product Domestic Regional Bruto* yang sering disebut sebagai PDRB tiap

daerah dari tahun ke tahun . Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah menurut laporan Bappeda Sulteng tentang “Capaian Pembangunan Sulteng Tahun 2012” adalah sebagai berikut:

Grafik 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Tahun 2007 – 2011



Sumber: Bappeda.Sulteng.go.id.

Pertumbuhan ekonomi Sulteng pada tahun 2007 sebesar 7,99%, 2 tahun kemudian mengalami penurunan yaitu pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 7,78% dan tahun 2009 sebesar 7,51%. Pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi 7,79% dan peningkatan terbesar adalah pada tahun 2011 yaitu sebesar 9,16%.

Walaupun angka indeks Gini Rasio provinsi Sulawesi Tengah masih berada pada indikasi yang relatif rendah, namun perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini nampak nyata sekali pada periode tahun 2005 dan 2007. Pada tahun 2002 ketika tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 7,19 % angka indeks Gini Rasio Sulawesi Tengah sebesar 0,301. Pada

tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi tengah mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,25 %, angka indeks Gini Rasio Sulawesi Tengah juga meningkat menjadi 0,318. Artinya, pada tahun 2002 dan 2007 ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tingkat yang rendah atau hampir tidak ada ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektoral terutama untuk kegiatan sektor industri selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah yang relatif lebih maju, sementara untuk daerah yang kurang berkembang tidak menjadi wilayah kegiatan industri. Perbedaan perlakuan inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana daerah maju memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan wilayah agraris mengalami perlambatan. Adanya perbedaan pertumbuhan inilah yang memicu adanya kesenjangan pendapatan antar masyarakat.

Dinamika perkembangan perekonomian provinsi Sulawesi Tengah adalah dinamika yang terdiri dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata dan wilayah yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Artinya fenomena adanya keterkaitan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat dalam skala yang lebih rendah dapat saja terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah atau mungkin juga tidak terjadi untuk beberapa kabupaten/kota tertentu yang ada di Sulawesi Tengah.

Berangkat dari keinginan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap persoalan tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian skripsi "*Trade Off*

Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 - 2011”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007 - 2011”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan.
2. Peneliti/Pembaca, sebagai referensi dan pembanding studi/penelitian yang terkait dengan riset ini.
3. Memperkaya khasanah keputakaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari atas lima bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep atau teori tentang “*Trade Off* antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan”

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai lokasi riset, data, model, alat analisis, dan lainnya yang berkaitan dengan metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan dibahas sesuai dengan teori-teori yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.